

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM SISTEM E-ORDER PADA PENGEMBANGAN UKM DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN THE E-ORDER SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF SMEs IN THE ADMINISTRATIVE CITY OF SOUTH JAKARTA

Asropi ¹, Reny Asmiyanti ², Mustika Berliantoro ³

E-mail: asropi0703@gmail.com 1reny.asmiyanti@gmail.com
Berliantoro@gmail.com

Abstrak: Study this aims for identify and understand urgency management application *e-Order* or online market for goods and services public for speed up SMES growth in DKI Jakarta Province. The program aims to increase growth economy and opportunity work for SMESs DKI Jakarta Province with provide marketing online. Website development is one of the political strategy and development strategy *e-government* national , that is implementation systematic development _ through realistic and measurable steps Government website development area is the first from four layers (web presence , interaction , transaction and transformation / integration) within stages development Indonesian *e-government* for possible Indonesian people with easy access information government area and participate in development Indonesian democracy through online media. Study this use approach qualitative through interviews and studies library, Study this showing several Thing that is first System application *e-Order* this is breakthrough innovative BPPBJ (Service Agency Procurement Goods and Services) Government DKI Jakarta Province Second, System Application *e-Order* is connecting application _ activity purchase SMES products (as supplier) with agency government province in DKI Jakarta. System building *e-Order* this is form cooperation Among Provincial government DKI Jakarta with citizen. DKI Jakarta residents can participate direct in the development process Technology Industry 4.0 DKI citizens must be IT -based care with IT progress, SMEs can develop marketing and owning quality more product _ fine, however permanent notice factor effective and efficient from use system *e-government*.

Kata Kunci: *System e-government, e-Order, SMEs, Jakpreneur*

Abstract: *Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami urgensi aplikasi manajemen e-Order atau pasar online barang dan jasa publik untuk mempercepat pertumbuhan UKM di Provinsi DKI Jakarta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja bagi UKM Provinsi DKI Jakarta dengan menyediakan pemasaran secara online. Pengembangan situs web adalah salah satu strategi politik dan strategi pengembangane-governmentnasiona, yaitu pelaksanaan pembangunan yang sistematis _ melalui langkah - langkah yang realistis dan terukur Bidang pembangunan website pemerintah adalah yang pertama dari empat lapisan (keberadaan web , interaksi , transaksi dan transformasi / integrasi) dalam tahapan pembangunan . bahasa Indonesiae-governmentagar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi pemerintahan daerah dan berpartisipasi dalam pembangunan demokrasi Indonesia melalui media online. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi kepustakaan, Kajian ini menunjukkan beberapa Hal yaitu pertama Aplikasi sistem e-Order ini merupakan terobosan inovatif BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kedua, Sistem Aplikasi e-Order bersifat menghubungkan aplikasi _ kegiatan pembelian produk UKM (sebagai pemasok) dengan instansi pemerintah provinsi di DKI Jakarta. Pembangunan sistem e-Order ini merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga. Warga DKI Jakarta dapat berpartisipasi langsung dalam proses pembangunan Teknologi Industri 4.0 Warga DKI harus berbasis IT peduli dengan kemajuan IT, UMKM dapat mengembangkan pemasaran dan memiliki produk yang lebih berkualitas _ baik, namun tetap memperhatikan faktor efektif dan efisien dari penggunaan sistem e-government .*

Keywords: *Sistem e-government, e-Order, UKM, Jakpreneur*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Masyarakat melalui e-government di bidang ekonomi khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diantaranya dilakukan dengan membangun tempat pemasaran produk berbasis website (Marketplace). diberi nama e-Order. Aplikasi e-Pesanan yang dibangun sendiri oleh Badan Layanan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta dan mulai diperkenalkan pada tahun 2019 sebagai pasar online UKM Provinsi DKI Jakarta yang membuka wadah bagi para UKM di DKI Jakarta untuk dapat menikmati Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Narasumber lebih lanjut menjelaskan bahwa “Tahun 2019 telah dilakukan pilot project di BPPBJ dengan membuat toko online bernama e-Order bekerja sama dengan BUMD Bank DKI dan disosialisasikan ke SKPD terkait dan pada bulan Juli 2020 dilakukan launching e- Pesanan”.

Menurut Prof. Richardus eco Indrajit untuk faktor penentu apa saja yang menjadi pengaruh dalam pengukuran kinerja kualitas dan efektivitas dimaksudkan untuk menjadi dinamika karakteristik layanan e-government. Namun dalam bukunya yang berjudul “Konsep Internet dan Informasi Layanan Publik Berbasis Teknologi”, menyebutkan ada beberapa kemungkinan indikator _digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi _ kualitas dan efektifitas pelayanan e-government (Indrajit dkk., 2007). Menurut lagu di Keagungan (2020), efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang disadari telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sedikit barang atas jasa kegiatan yang dilakukannya. Kualitas dari suatu pelayanan akan memberikan dampak bagi pencapaian target pemerintah sehingga bisa dikatakan efektivitas atau nggak layanan yang disediakan oleh pemerintah (Muliati, 2020).

Situs web pemerintah adalah sebuah komunitas yang dapat digambarkan sebagai

metode perubahan alat komunikasi yang digunakan _ dengan menggunakan teknologi komunikasi informasi (USDRP, 2010). Tentang pengembangan dan penerapan e-governance yang efektif, penting bahwa dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai _ dengan keterampilan dan kemampuan yang sesuai. _ Untuk tujuan ini kekurangan _ sumber daya rakyat di birokrasi provinsi ditambah dengan infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya pengembangan perangkat perangkat keras dan perangkat perangkat lunak yang memadai, serta proses pelayanan publik yang terbuka dan akuntabel _ telah diidentifikasi sebagai kendala bagi e-government. (Nurdiarti & Santoso, 2018) . Rachmawati dalam Prayoga (2017) teknologi adalah peran utama, bersama dengan proses dan sumber daya manusia (Prayoga J, 2017).

Semakin meningkatnya minat penggunaan website oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai latar belakang _ masalah dalam pelaksanaan adopsi e-government. Masalah _ pertama adalah draf pemikiran dan pendekatan itu e-government tidak jelas. Di sisi lain, ada pesta tontonan _ e-governmentnya sebagai sistem aplikasi build yang membuka informasi _ untuk umum. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat demikian e-governmentnya mencoba untuk menampilkan informasi resmi di Internet dan kemudian memberikan pelayanan kepada publik melalui media yang sama. UNDP (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa). secara sederhana mendefinisikan e-government, yaitu: “e-government adalah penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh pemerintah (Indrajit dkk., 2007).

e-government menurut Clay G Wescott: “e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan hemat biaya, memfasilitasi layanan pemerintah yang lebih nyaman, memungkinkan akses publik yang lebih besar terhadap informasi, dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada warga negara” (Indrajit dkk., 2007).

e-government adalah aplikasi ateknologiinformasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak lain, dimana penggunaan teknologi informasi menghasilkan suatu bentuk hubungan seperti G2C (Government to Citizens), GTB (Government to Business Enterprise) dan G2G (Government to Government/Inter Agency).*hubungan* (Junaidi, 2005). Kaitan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi tentang keterlibatan masyarakat pelayanan dalam proses kebijakan masyarakat, memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang kualitas dan proses pelayanan masyarakat, sehingga merupakan hal yang penting untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. sementara Oleh karena itu, G2B mengacu pada interaksi antara instansi pemerintah dan swasta, melalui media elektronik. G2E, hubungan penyedia-pengguna antara pemerintah dan pegawai pemerintah, sedangkan G2Gmenggambarkan layanan pertukaran menggunakan media elektronik di antara organisasi pemerintah.(Shobaruddin, 2018)

Bahwa pengembangan e-government di Indonesia terdapat beberapa kebijakan diantaranya salah satunya yaitu Penerapan e-government dalam Pengembangan UKM yang merupakan salah satu jenis teknologi aplikasiuntukmeningkatkan penjualan produk melalui pemasaran berbagai produk atau jasa, baik dalam bentuk digital maupun fisik dimana dengan adanya teknologi elektronik berbasis e-government dan informasi digital dapat dengan cepat menginformasikan layanan yang diinginkan oleh pemilik produk, sehingga setiap layanan dapat dilacak secepat mungkin untuk diberikan. pelayanan terbaik dan tercepat , sebelum ada teknologi digital yang melayani pelanggan ingin membeli barang harus datang ke penjual sendiri yang sangat tidak efisien untuk pelanggan sibuk , namun _ dengan adanya layanan informasi digital ini pelanggan dapat mengakses dan memesan dari berbagai tempat atau tempat lokasi .

Seiring dengan semakin berkembangnya aplikasi e-Order berbagai kendala sering muncul dan perlu penanganan yang cepat dan

menyeluruh agar tidak mengganggu kinerja pelayanan pemberdayaan UMKM di Provinsi DKI Jakarta serta memastikan akuntabilitas belanja barang/jasa SKPD/UKPD yang menjadi pelanggan di aplikasi sistem ini. Sehingga dapat mengidentifikasi masalah dari pembelajaran sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan jumlah UKM yang terdaftar di aplikasi e-Order masih belum maksimal, tahun 2022 ada sebanyak 1.000 pendaftar Program Jakpreneur8.393binaan Sudin Perindustrian Perdagangan Jakarta Selatan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Administratif yang teridentifikasi saja282UKM binaan yang telah terdaftar di e-Order dari total1.651UKM se-DKI Jakarta yang telah terdaftar di e-Order terhitung sejakNovember 2022(sistem e-Order);
- b. Kemampuan dan pemahaman UKM dalam _menggunakan teknologi informasi yang masih minim sehingga terjadi kesulitan dalam proses pelaksanaan dan pembuatan dokumentasi kegiatan melalui aplikasi e-Order.
- c. Dalam proses pendaftaran untuk melihat produk ke sistem e-Order UKM harus melalui tahapan birokrasi yang panjang; _
- d. Spesifikasi produk dalam sistem e-Order belum memiliki standarisasi standar _ dari instansi pembina UKM dan pengelola sistem e-Order BPPBJ sehingga membingungkan pejabat pengadaan barang dan jasa (PPBJ) untuk memastikan spesifikasi yang sesuai dan membandingkan _ harga antar penyedia.
- e. Kategorisasi jenis produk belum termanfaatkan secara maksimal dalam sistem e-order sehingga banyak UKM yang menayangkan produk tidak sesuai dengan kategori yang dipilih, misalnya kegiatan penjualan alat kebersihan yang dimasukkan ke dalam kategori makanan, hal ini membuat PPBJ

kesulitan mencari produk yang sesuai _ di e-Order.

- f. Di sana adalah pemesanan pembatasan wilayah internal di sistem e-Order dengan radius 10KM dari SKPD/UKPD

Berdasarkan Masalah yang telah ditampilkan di latar belakang jadi pertanyaan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana meningkatkan kemampuan UKM dalam _ menggunakan teknologi informasi e-government pada Sistem e-Order di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
- b. Strategi apa yang dilakukan Pemerintah dalam Pembangunan Aplikasi e-Order di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metodologi pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa analisis kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan tentang orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis Deskriptif yaitu mendeskripsikan bagaimana penerapan aplikasi e-Order sebagai bagian dari program e-government dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada suatu waktu aplikasi yang digunakan _ untuk pemberdayaan UKM di provinsi DKI Jakarta, khususnya metode kerja aplikasi ini mulai dari pendaftaran hingga penjualan dan dokumentasi , selanjutnya akan dilakukan analisis berdasarkan kebutuhan kepentingan stakeholder yang berbeda _ untuk memberikan rekomendasi usulan pengembangan aplikasi-*Pesanan*.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, Observasi, Dokumentasi dan studi Referensi untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan atau bahan berupa buku, artikel dan laporan terkait e-government pada implementasi sistem e-

Order di wilayah administrasi kota Jakarta Selatan. Informasi diklasifikasikan sebagai berikut: Data primer, yaitu sumber data penelitian yang menyediakan data secara sistematis langsung kepada pengumpul data dan tidak melalui perantara (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah latar belakang pembangunan aplikasi e-Order dan gambaran umum tentang e-Order, serta informasi terkait prosedur penggunaan dan penggunaannya oleh UKM di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selain itu, dikumpulkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan data tersebut. Data tersebut digunakan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun masukan untuk pengembangan strategi dan implementasi e-Order UKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Meningkatkan kemampuan UKM dalam _ Pemanfaatan teknologi informasi e-government Pada Sistem e-Order.

Memahami dan terampil pengguna teknologi informasi terkait dengan penerapan teknologi informasi tersebut di dalam use menjadi faktor pendorong tingginya interaksi user dalam mengakses informasi dan menggunakan informasi dari aplikasi tersebut. Saat ini banyak sekali aplikasi yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat. Pemahaman tentang manfaat dan kemudahan metode penggunaan aplikasi sangat penting karena meluncurkan aplikasi _ di tengah-tengah publik akan bersaing dengan aplikasi serupa lainnya. Aplikasi e-Order sebagai marketplace akan bersaing marketplace yang lain sudah lebih terbiasa dengan masyarakat menengah dan menggunakan hari untuk berbelanja online. Untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat khususnya UKM dalam memanfaatkan aplikasi e-Order diperlukan sosialisasi terkait manfaat dan cara penggunaan yang praktis _ dengan sosialisasi yang masif dan interaktif. _ Sosialisasi kegiatan dapat dilakukan oleh pengelola e-Order dan pengelola e-Order di Hal ini BPPBJ Provinsi DKI Jakarta dan

Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta yang dapat dilimpahkan per wilayah melalui Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) dan Pelayanan PPKUKM suku di masing-masing Kota Administratif.

Sejak diluncurkan *e-Order* Narasumber pertama kali di wawancara menyampaikan bahwa Badan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta (BPPBJ) menyelenggarakan sosialisasi mekanisme penerapan sistem barang tunggal elektronik untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi pengawas atau unit pelaksana utama (Kasatpel) percontohan program pengembangan terpadu (PKT) pada tanggal 19-26 Juni 2019, Sosialisasi ini dilakukan bersama Kasatpel PKT dan Penyedia Layanan Lainnya untuk Perorangan (PJLP) di tujuh SKPD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. Tujuh SKPD yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Departemen Perindustrian dan Energi (PE); Dinas Pemberdayaan Anak Perlindungan dan Pengendalian Penduduk (PPAPP); Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM (PPKUKM); dan Dinas Pertahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta.

Bidang Pengadaan Jasa Manajemen secara elektronik BPPBJ adalah unit kerja di BPPBJ Provinsi DKI Jakarta yang mengembangkan *e-Order* sebagai Marketplace UKM di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pemberdayaan UKM melalui *e-government* di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, tugas ini secara khusus dikelola oleh sub bidang Pengembangan Sistem Informasi sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan sistem informasi dan implementasi kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Bidang Manajemen Pengadaan Jasa Elektronik. atas dasar tugas dan fungsinya maka seluruh proses operasional sistem *e-Order* dikelola oleh sub bidang Pengembangan Sistem Informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan badan BPPBJ khususnya sub bidang Pengembangan Sistem Informasi selaku pengelola *e-Order* menjelaskan tentang

sejarah awal mula *e-Order* dalam bentuk form, narasumber menjelaskan, "Setelah dilakukan pertemuan tentang pembinaan dalam program Jakpreneur dengan Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyimpulkan bahwa banyak barang hasil produksi UKM yang berkualitas baik _ namun untuk melakukan pemasaran masih terbatas melalui bazaar saja , yang selanjutnya terkait besaran anggaran penyerapan makan dan minum dalam APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebesar 800 Miliar yang hanya didominasi oleh 2 (dua) merek ternama saja dan tidak melibatkan UKM karena _ _perizinan usaha yang sulit_ bagi UKM antara lain diperlukan legalitas resmi bentuk badan usaha yang disyaratkan dipenuhi terlebih dahulu dengan biaya yang dirasa cukup tinggi bagi UKM dan lama, legalitas yang meliputi Akta Pendirian Badan Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan dokumen pendukung lainnya sebagai syarat kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Waktu yang cukup lama bagi UKM untuk pembayaran dari pemerintah setelah tahapan penyelesaian pekerjaan juga menjadi kendala bagi UKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa karena keterbatasan modal". Lebih lanjut Bapak Andri menyampaikan, "Hasil pertemuan tersebut menjadi dasar yang dia usulkan sistem pemberdayaan UMKM agar dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi DKI Jakarta melalui sistem *E-Purchasing*".

Sistem *E-Purchasing* diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sistem ini diharapkan memberikan kemudahan untuk UKM melalui upaya penyederhanaan kualifikasi atau perizinan, penyederhanaan sistem pembayaran dan kemudahan akses informasi yang terintegrasi _ dalam suatu sistem yang disebut Toko Online dalam

peraturan. Kemudahan perizinan bagi UKM adalah dengan Izin Pakai IUMK berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang UKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Pelayanan Usaha Terpadu Secara Elektronik.

e-Order didukung dengan Instruksi Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang pengadaan transaksi langsung dengan UKM melalui sistem E-Order sehingga menjadi Pejabat KPI di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada awal e-Order diluncurkan pada bulan Juli 2020 tercatat transaksi sekitar Rp. 300 juta, waktu launching e-Order dimana awal pandemi covid-19 ada refocusing anggaran tahun 2020 yang berdampak pada pengurangan anggaran untuk makan minum di APBD Provinsi DKI Jakarta sehingga low impact _ penyerapan anggaran melalui Pengeluaran APBD di e-Order, maka pada tahun 2021 akan terjadi peningkatan pengeluaran APBD di e-Order dimana transaksi sebesar Rp 42 Miliar melalui e-Order, dan saat ini pada November 2022 tercatat transaksi sudah lebih dari Rp 160 Miliar.

a. Aplikasi Informasi Implementasi aplikasi e-Order

Sesuai dengan tujuan yang kami sampaikan dalam makalah ini yaitu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisa dan merancang proposal pengembangan e-government yang ada berupa sistem aplikasi e-Order, maka kami sajikan bagaimana penerapan e-Order yang sekarang ini sebagai aplikasi e- pemerintah untuk pemberdayaan UKM.

e-government merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses administrasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pemeliharaan pelayanan publik. *e-government* mengacu pada kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan bisnis,

dan antara lembaga pemerintah, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Semua ini dengan bantuan teknologi internet bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja _ saja

perkembangan teknologi informasi yang cepat dan penggunaannya yang meluas membuka kemungkinan lebih banyak akses _ cepat, lebih akurat, pengelolaan dan penggunaan informasi dalam jumlah _ lebih besar. Pemerintah harus mampu memberikan informasi yang cukup _ kepada masyarakat, untuk menghindari potensi kesalahpahaman _ menyesatkan. Kegagalan untuk beradaptasi dengan tren global ini mendorong orang ke dalam kesenjangan digital. mengisolasi diri dari karena perkembangan global UKM tidak tahu bagaimana menggunakan informasi.

Pemerintah harus segera melakukan transisi ke e-government melalui proses perubahan, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk menghilangkan sekat-sekat birokrasi organisasi dan membangun sistem jaringan manajemen dan proses kerja, sehingga instansi pemerintah dapat beroperasi lebih efisien. Integrasi untuk menyediakan akses ke semua informasi dan layanan publik. Penyederhanaan kebutuhan pemerintah untuk mengantisipasi regulasi yang dikeluarkan juga dimaksudkan untuk mendorong Public go to public information. Pada dasarnya _ tujuan dari setiap reformasi dan perubahan pemerintahan adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis _ dengan membangun sistem pemerintahan yang lebih _ baik (*good governance*). Transparansi didasarkan pada informasi bebas saat ini, di mana semua proses administrasi dan informasi tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan.

b. Pendampingan Jakpreneur ke UKM _

Pendampingan UKM dapat diartikan secara besar sebagai upaya membantu, membimbing dan mendukung individu/kelompok UKM dalam

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam mengembangkan usahanya. Melakukan pendampingan UMKM yang efektif, efisien, ekonomis dan tepat guna diperlukan pedoman teknis usaha menengah pendampingan UMKM adalah badan usaha yang berdiri produktif _ dimiliki dan dioperasikan oleh orang perseorangan atau unit usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan yang langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai, atau Menjadi bagian dari perusahaan kecil atau besar.

Berdasarkan data jumlah UKM Jaksel yang terdaftar di e-Order sebanyak 633 UKM berarti ada 200 UKM Non PKT atau tidak ada yang merupakan UKM binaan Sudin Industri Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kesimpulan dari hasil survey terhadap 30 UKM di wilayah Jakarta Selatan bahwa sebanyak 13 Peserta Jakpreneur yang telah mendaftar di sistem e-Order, 11 Belum terdaftar Menjadi Jakpreneur dan sudah terdaftar di sistem e-Order, 4 Peserta Jakpreneur yang belum terdaftar di sistem e-Order, dan 2 orang belum terdaftar menjadi Jakpreneur dan belum terdaftar di sistem E-Order, data survey dari 30 data yaitu sebanyak 24 orang anggota baik Jakpreneur (PKT) dan non Jakpreneur (Non PKT) telah terdaftar di sistem e-Order. Adapun beberapa hal terkait UKM yang belum terdaftar menjadi peserta e-Order dikarenakan belum cukup memahami teknologi dalam penggunaan aplikasi e-Order sehingga lebih banyak UKM _ memilih cara konvensional dalam proses pemasarannya.

Peneliti juga menerima informasi tentang kinerja penyerapan anggaran APBD melalui e-Order UKM di Kota Administrasi Jakarta Selatan selama tahun 2022 sebagai salah satu _ bahan analisis, dimana sampai dengan November 2022 dari 633 e-Order UKM di Jakarta Selatan terdapat 97 UKM atau hanya 15,32% yang bertransaksi dengan total transaksi di sebesar Rp40.120.570.150,00 (Empat Puluh Miliar

Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Sepuluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), dari jumlah tersebut hanya 31,14% atau Rp12,5 Miliar transaksi APBD yang dilakukan oleh PKT UMKM binaan.

e-Pesanan adalah Pasar Online UKM di Provinsi DKI Jakarta, dimana UKM Mendapatkan akses untuk Mempromosikan Produk Barang/Jasa, SKPD/UKPD Menerima Pemesanan Barang/Jasa langsung ke UKM, Menciptakan Peluang usaha adapun metode pendaftaran e-Order sebagai berikut:

Mekanisme pendaftaran e-order

1. Registrasi Persyaratan
Persyaratan Dokumen Wajib perorangan _ yaitu: (1) Izin Usaha (IUMK/NIB/ DII), (2) KTP, (3) NPWP, (4) Buku Rekening.
2. Bagaimana Pelaku UKM Mendaftar Melalui Aplikasi E-Order
Pelaku UKM dapat mendaftar melalui website E Order <https://eorder-bppbj.jakarta.go.id> atau bisa datang langsung ke sekretariat Jakpreneur tingkat kecamatan di kecamatan setempat untuk mendaftar khususnya mantan anggota Jakpreneur . Setelah mendaftar menjadi anggota Jakpreneur, UKM dapat mengikuti pelatihan dan pendampingan dari pendamping Jakpreneur yang ada di setiap kecamatan. Anggota Jakpreneur yang telah mencapai Izin Langkah dan memiliki IUMK selanjutnya yang lengkap Persyaratan yang diperlukan dalam sistem e-Order adalah scan dokumen KTP, NPWP, Izin Usaha (IUMK)/NIB dan buku Rekening Bank Aktif. Verifikasi UKM agar dapat masuk dalam sistem e-Order dan status terdaftar dilakukan oleh Pembina UKM, Pembina UKM tingkat Kecamatan dan Administrator e-Order. Setelah Langkah ini UKM baru bisa mengupload produk ke katalog e-Order untuk ditawarkan.

3. Produk yang dapat didaftarkan di Sistem E Order
 Kini e-Order ini dikhususkan untuk media transaksi UKM dengan satuan kerja atau perangkat satuan kerja daerah dalam proses penyerapan anggaran dan belanja daerah di 5 (lima) kota administratif dan kabupaten pulau seribu. Hingga dengan jurnal ini dibuat (November 2022) dengan peserta program Jakpreneur sebanyak 32.752 dengan jumlah 1.651 UKM telah mendaftarkan e-Order dengan total transaksi belanja mencapai 160 Miliar Rupiah, nilai transaksinya meningkat signifikan dibandingkan skor transaksi tahun sebelumnya di kisaran tersebut sebesar 2 Miliar Rupiah _ satu tahun , hal ini di antaranya karena dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan belanja melalui UKM pada platform e-Order sebagai kesepakatan kinerja kepala SKPD/UKPD dan KPI untuk Direktur BUMD DKI Jakarta.

Tabel 1
Peserta Program Jakpreneur dan E Order Tahun 2022

No	Wilayah	Peserta Program Jakpreneur	peserta E-Order	Persentase
1	Jakarta Pusat	5377	351	7%
2	Jakarta Barat	6367	326	5%
3	Jakarta Utara	4383	193	4%
4	Jakarta Selatan	8393	282	3%
5	Jakarta Timur	8177	499	6%
6	Pulau Seribu	55	0	-

Sumber: jakpreneur.jakarta.go.id dan eorder-bppbj.jakarta.go.id

II. Strategi Pemerintah untuk Pengembangan aplikasi e-Order

A. Pengembangan sistem aplikasi e-Order sebagai E-Marketplace

e-Pesanan sebagai Toko Online terdaftar secara resmi di Lembaga Kebijakan E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang disediakan untuk Pemenuhan kebutuhan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 70. Terkait dengan hal UKPBJ tersebut dalam Pasal 70 ayat (4) di atas, di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melekat pada BPPBJ Provinsi DKI Jakarta. Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan e-Order, BPPBJ Provinsi DKI Jakarta saat ini terus melakukan evaluasi dan monitoring aplikasi e-Order agar dapat lebih banyak melakukan pengembangan _baik lagi dalam rangka pemberdayaan UKM melalui keterlibatan UKM untuk pemenuhan kebutuhan barang/jasa pemerintah DKI Provinsi Jakarta.

Hasil wawancara dan diskusi terkait pengembangan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan perbaikan kelemahan saat ini _ hal ini terlihat dan dirasakan menghambat proses interaksi antara UKM sebagai penjual dan SKPD/UKPD sebagai pelanggan maupun dengan pengelola e-Order SKPD (BPPBJ/Layanan UKM) sebagai Pengelola. Pengembangan yang sesuai _ peneliti cukup penting terkait Hal-hal tersebut adalah:

1. Perlu dilakukan perbaikan pada proses pencarian kategori UKM di berbagai daerah dengan memunculkan fitur kategori bisnis UKM yang mudah diakses user sehingga dapat langsung dipantau oleh pengelola e-Order baik di BPPBJ maupun Dinas UKM Terkait pendistribusian UKM berdasarkan kategori usaha di masing-masing wilayah administrasi kota Provinsi DKI Jakarta, fitur ini juga akan memudahkan pelanggan SKPD untuk melihat dan membandingkan

- produk dalam kategori usaha yang sama. _
2. Perlu menghapus pembatasan area perbelanjaan SKPD pelanggan saat ini _ ini diadakan dalam jarak 10 KM dari lokasi pengiriman atau kantor SKPD karena Hal ini menyebabkan penurunan daya saing dan peluang untuk mempromosikan diri bagi UKM dalam lingkup jarak 10 KM dari lokasi memiliki jumlah yang terbatas pelanggan SKPD. Karena hal ini juga tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada UKM untuk mempromosikan produknya melalui proses E-Purchasing.
 3. UKM perlu diberi kesempatan lebih luas dan lebih mudah untuk melihat produk di aplikasi e-Order, bagi BPPBJ Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas UKM perlu mempersiapkan konsultasi layanan menyelesaikan pendaftaran _ dengan standar layanan yang jelas dan terukur _ melalui aplikasi layanan elektronik sehingga bahwa UKM dapat dengan mudah Memenuhi persyaratan administrasi dan mendapatkan kepastian jangka waktu proses pendaftaran sampai dengan melihat produk di sistem e-Order.
 4. mempercepat pengembangan sistem E Order yang dapat diakses secara penuh melalui Mobile APP. Manfaat aplikasi mobile adalah untuk memberikan saluran pemasaran secara langsung. Berdasarkan informasi Wawancara terkait Pengembangan Aplikasi e-Order dengan Sub Bidang Pengembangan BPPBJ Provinsi DKI Jakarta, Pengelola e-Order telah membuat fitur SMS Notifikasi melalui aplikasi mobile untuk notifikasi jika ada pemesanan dan waktu baru ini hanya UKM yang bisa menggunakan mobile apps, sedangkan SKPD sebagai pelanggan belum bisa

menggunakan Mobile Apps karena masih dalam proses pengembangan aplikasi.

B. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pemberdayaan UKM

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 untuk Percepatan Pemberdayaan UMKM maka ditegaskan pertama kali dalam Instruksi diantaranya kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong kebijakan yang menetapkan dan/atau mengubah kebijakan yang telah ada untuk percepatan pemberdayaan UMKM , Instruksi Presiden tersebut telah secara tegas menyampaikan perlu peran _ dilakukan pemerintah daerah untuk melaksanakannya dengan memerintahkan SKPD/UKPD di daerah untuk berbelanja produk di dalam negeri melalui e-catalog lokal atau toko onlinemenyukaie-Pesanan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022dikeluarkansedangkan program Jakpreneur mengklasifikasikannya dalam 24 kategori usaha yang memungkinkan _dimasuki oleh para pelaku UKM dan tiba saat ini 59% UKM di e-Order di bawah pembinaan Jakpreneur Sudin UKM Kota Administrasi Jakarta Selatan masuk dalam kategori pengusaha bidang makan dan minum. Diharapkan ada kebijakan selanjutnya yang lebih mengakomodir UKM dengan kategori usaha lain untuk ikut diberdayakan melalui e-Order.

KESIMPULAN

Aplikasi e-Order sebagai marketplace akan bersaing *marketplace* yang lain sudah lebih terbiasa dengan masyarakat menengah dan menggunakan hari untuk berbelanja online. Untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat khususnya UKM dalam memanfaatkan aplikasi e-Order diperlukan sosialisasi terkait manfaat dan cara penggunaan yang praktis _ dengan sosialisasi yang masif dan interaktif. _

Aplikasi e-government dengan tujuan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat maupun dengan UKM dapat berlangsung secara efektif, efisien dan ekonomis. Permulaan program e-Order yang dirancang sebagai platform belanja online sangat berguna bagi pelaku usaha UKM apapun Manfaat bagi pengusaha UKM setelah bergabung dengan e-Order Pelaku UKM dapat meningkatkan kapasitas rata-rata produksi dan penjualan _ meningkat hingga 40-60%, untuk membeli UKM produk yang diinginkan dan konsumen Menjadi informasi yang efisien dan efektif. Namun kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman operator e-Order dalam menggunakan sistem tersebut.

Pemerintah memperbanyak seksi kode koneksi atau kerjasama agar produk UKM jauh lebih besar pasarnya dan berkembang dengan baik. Selain itu, melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan program e-Order yang dapat digunakan secara online melalui pasar. Pengusaha UKM disarankan untuk menambahkan media iklan online ke media sosial lainnya untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan secara signifikan dan lebih meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardono, V. (2015). Kualitas dan Efektivitas E Government Sebagai Media Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.
- Indrajit, RE, Rudianto, D., & Zainuddin, A. (2007). Aksi Pemerintahan Elektronik: Implementasi Strategi di Berbagai Negara. APTIKOM.
- Junaidi. (2005). Government dalam bingkai Reformasi Administrasi Publik Menuju Good Governance. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, 9(1).
- Mariano, S. (nd). Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal.
- Maulidiah, S., Wasisistiono, S., & Rauf, RR (2014). Pelayanan Publik: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Pada tahun 2014. CV. Indra Prahasta.
- Muliati. (2020). Prosedur Standar Operasional, Untuk Aspek Manajerial dan Prosedur Standar Operasional tentang Proses Kerja. Jurnal Meraja, 3(2).
- Nugraha, JT (2018). E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media , 2(1), 32–42.
- Nurdiarti, RP, & Santoso, DH (2018). Komunikasi dan E-Government: Studi Kasus Implementasi E-Government dalam Komunikasi Pariwisata di Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 22(2), 117–127. <https://journal.ugm.ac.id/jkap>
- Prayoga J. (2017). Penerapan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Efektivitas, Efisiensi dan Produktivitas Perusahaan. Jurnal Warta.
- Retnowati, ND, & Retnowati, D. (2008). Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat. Seminar Nasional Informatika.
- Shobaruddin, M. (2018). Faktor Kritis yang Mempengaruhi Peningkatan Kapasitas Electronic Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Sragen. 22(2), 98–116. <https://journal.ugm.ac.id/jkap>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Thahier, R. (2013). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik Di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan, 3(2), 66–77. <https://doi.org/10.5296/jpag.v3i2.3827>

USDRP. (2010). Buku Panduan Pengembangan
Situs Web Pemerintah Daerah Peserta
USDRP (Urban Sector Development
Reform Project).

Website Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta <https://eorder-bppbj.jakarta.go.id>

Sukses Kembangkan UMKM Lewat e-Order,
Pemprov DKI Raih Procurement Award
2020, <https://www.beritajakarta.id/> diakses
15 September 2022

Peraturan

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Nasional E-
Government

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Percepatan Peningkatan
Pemanfaatan Produk Dalam Negeri
Dan Produk Usaha Mikro, Usaha
Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka
Mensukseskan Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia Pada
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Instruksi Gubernur Nomor 48 Tahun 2020
tentang Transaksi Pengadaan Langsung
Dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil
(Melalui sistem e-Order).